

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan output yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi sehingga dapat menggambarkan bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi tersebut pada suatu periode waktu tertentu (Widya, 2012). Selain itu pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Begitu juga pembangunan di daerah sasaran utamanya yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Dalam mencapai sasaran pembangunan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pembangunan. Menurut Mankiw (2007) pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan *output*. Kenaikan pendapatan nasional dapat dilihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan setiap tahunnya oleh suatu negara. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah dilihat

dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahun (Kontesa, 2018).

PDRB merupakan pendapatan nasional yang dapat dihitung dari sisi produksi, pengeluaran, maupun penerimaan. Dari sisi pengeluaran dapat dihitung pengeluaran yang dibayarkan oleh masing-masing pelaku ekonomi. Pihak luar negeri melakukan perdagangan internasional baik melalui ekspor ataupun impor, pemerintah melakukan belanja untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, sedangkan rumah tangga melakukan pengeluaran berupa konsumsi yang dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak, perusahaan atau swasta mengeluarkan biaya untuk berinvestasi.

PDRB dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kebijakan pemerintah itu. Kebijakan tersebut harus dikenali secara cepat dan tepat agar suatu daerah dapat meningkatkan pertumbuhannya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat pada tahun mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat tahun 2016 sebesar 5,52 persen, sedangkan tahun 2015 mencapai 5,52 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan dan minum sebesar 11,15 persen, diikuti oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 10,94 persen, dan lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,95 persen. Untuk lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 1,96 persen ( Badan Pusat Statistik, 2017).

**Tabel 1.1.**

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**

**Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>PDRB (Juta Rupiah)</b>
<b>Kabupaten</b>	
1. Kep. Mentawai	3.721,50
2. Pesisir Selatan	10.685,34
3. Solok	11.046,63
4. Sijunjung	7.721,36
5. Tanah Datar	10.727,03
6. Padang Pariaman	17.521,18
7. Agam	16.520,89
8. Lima Puluh Kota	12.627,31
9. Pasaman	6.995,78
10. Solok Selatan	4.598,32
11. Dharmasraya	8.433,53
12. Pasaman Barat	12.795,02
<b>Kota</b>	
1. Padang	49.296,19
2. Solok	3.238,35
4. Sawahlunto	2.938,79
5. Padang Panjang	2.773,91
6. Bukittinggi	6.749,79
7. Payakumbuh	4.983,38
8. Pariaman	4.004,35
<b>Jumlah/Total</b>	<b>197.378,74</b>

*Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2017*

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tidak luput dari pertumbuhan perekonomian pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Sebagaimana kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, perekonomian Kota Padang tetap menjadi barometer dari perekonomian Sumatera Barat. Hal ini bisa dimengerti karena Padang adalah ibu kota provinsi dengan potensi ekonomi yang paling besar bila dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya. Dari nilai PDRB yang dihasilkan, Kota Padang jauh mengungguli

kabupaten/kota lainnya. PDRB Kota Padang tahun 2016 adalah sebesar 49.296,19 juta rupiah, sementara diurutan berikutnya adalah Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai PDRB sebesar 17.521,18 juta rupiah, dan diurutan ketiga adalah kabupaten Agam dengan nilai PDRB sebesar 16.520,89 juta rupiah .Kota Padang Panjang menjadi Kabupaten/Kota dengan nilai PDRB sebesar 2.773.91 juta rupiah dan diikuti oleh Kota Sawahlunto dengan PDRB sebesar 2.938,35 juta rupiah. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kota Padang Panjang dari tahun-ketahun dapat dilihat dari data PDRB harga konstan kota Padang Panjang, sebagai berikut :

**Tabel 1.2.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang Panjang atas harga konstan**  
**2010, pada tahun 2003-2016**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB ADHK 2010 (Rp)</b>	<b>Laju Pertumbuhan PDRB (%)</b>
2003	1.018.667.163.000	
2004	1.072.956.701.000	5,32
2005	1.134.538.319.000	5,73
2006	1.203.813.083.000	6,10
2007	1.280.598.689.000	6,37
2008	1.360.884.493.000	6,26
2009	1.446.850.828.000	6,31
2010	1.534.408.988.000	6,05
2011	1.628.687.164.000	6,14
2012	1.730.270.000.000	6,23
2013	1.839.393.130.000	6,30
2014	1.951.674.180.000	6,10
2015	2.065.996.860.000	5,85
2016	2.185.791.000.000	5,79
<b>Rata-tata</b>	<b>1.532.466.471.000</b>	<b>6,04</b>

*Sumber : Sumatera Barat dalam Angka, data diolah*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Padang Panjang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama 14 tahun terakhir Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Padang Panjang terus mengalami kenaikan tahunnya. Jumlah PDRB tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 2.185.791.000.000 dengan laju pertumbuhan 5,79 persen. Dan terendah pada tahun 2003 sebesar Rp 1.018.667.163.000 dengan laju pertumbuhan PDRB rata-rata sebesar Rp 1.532.466.471.000 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6,04 persen.

Dilihat dari Kontribusi kota Padang Panjang terhadap jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang merupakan daerah dengan kontribusi terkecil dibandingkan dengan daerah lain yang di Sumatera Barat. Pada tahun 2016 kota Padang Panjang memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,41 persen, mengalami kenaikan sebesar 0.01 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan daerah dengan kontribusi terbesar adalah Kota Padang, dengan kontribusi sebesar 24,88 persen pada tahun 2015, mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen pada tahun 2016 menjadi 24,98 persen (Badan Pusat Statistik, 2017).

Peningkatan/penurunan PDRB Kota Padang Panjang diduga dipengaruhi oleh perubahan pengeluaran pemerintah dan TPAK hal ini dikarenakan Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah dalam APBD, yang digunakan dalam membiayai aktivitas pembangunan dan program-program layanan publik di daerah pengeluaran pemerintah mempengaruhi Pendapatan daerah.. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dan tergantung dari besarnya penerimaan pemerintah.

Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan pencerminan pengeluaran pemerintah.

Untuk melihat perkembangan jumlah pengeluaran yang harus dikeluarkan pemerintah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Laporan realisasi pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam APBD Kota Padang Panjang. jumlah pengeluaran pemerintah kota Padang Panjang yang terus mengalami kenaikan setiap tahun, terlihat dengan jumlah pengeluaran pemerintah Pengeluaran Rp 406.617.041.000 di tahun 2014 menjadi Rp 692.346.992.000 pada tahun 2016, dengan laju pertumbuhan 3,89 persen di tahun 2014 terus naik hingga 41,20 persen di dua tahun sesudahnya. Perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan (Dornbusch dan Fischer,1999). Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Jika perekonomian berada dalam resesi, pajak harus dikurangi atau pengeluaran pemerintah ditingkatkan untuk menaikkan output. Jika sedang berada dalam masa makmur (booming), pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi agar kembali ke penggunaan tenaga kerja penuh (Afrizal,2013).

Suatu perekonomian yang berkembang dengan pesat belum tentu mendapat jaminan bahwa suatu daerah tersebut makmur apabila tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja guna menampung tenaga kerja baru (Kontesa, 2018). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah, dengan interpretasi semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula

tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (Badab Pusat Statistik, 2010).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang Panjang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2005 TPAK sebesar 61.71% meningkat menjadi 64.47% pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010 sebesar 71.56% mengalami penurunan sebesar 5.05% pada tahun 2011 menjadi 67.94%., pada dasarnya pertumbuhan alami dari jumlah penduduk usia kerja yang juga diikuti dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja baik yang telah memasuki dunia kerja maupun yang mencari pekerjaan. Namun seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan TPAK tersebut terhadap PDRB kota Padang Panjang belum dapat diketahui. Berdasarkan analisis dan uraian di atas maka peneliti ingin mengkaji dan menganalisis **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan TPAK Terhadap PDRB Kota Padang Panjang tahun 2003-2016”**.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang sudah ditetapkan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Kota Padang Panjang tahun 2003-2016 ?
2. Bagaimana Pengaruh TPAK terhadap PDRB Kota Padang Panjang tahun 2003-2016 ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

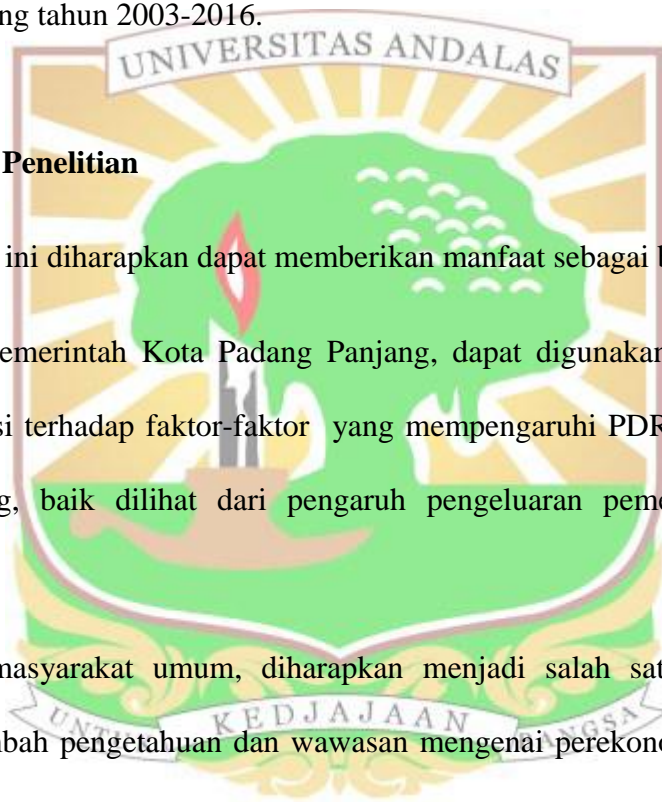
Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB Kota Padang Panjang tahun 2003-2016 ?
2. Untuk menganalisis pengaruh TPAK terhadap PDRB Kota Padang Panjang tahun 2003-2016.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kota Padang Panjang, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Kota Padang Panjang, baik dilihat dari pengaruh pengeluaran pemerintah maupun TPAK.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan menjadi salah satu media untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perekonomian Sumatera Barat terutama PDRB Kota Padang Panjang.
3. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai PDRB.
4. Bagi penulis, dapat menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah dan TPAK terhadap PDRB Kota Padang Panjang.





## 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Kota Padang Panjang. Faktor-faktor yang menjadi variabel bebas dalam penelitian terdiri dari pengeluaran pemerintah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sedangkan tujuan akhir penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel-variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat yaitu PDRB Kota Padang Panjang. Daerah yang menjadi objek penelitian adalah Kota Padang Panjang dengan data yang digunakan dimulai dari tahun 2003 hingga 2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini statistika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori, penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian, kerangka konseptual, serta hipotesa yang terkait

mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah dan TPAK terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang Panjang.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis serta sumber data, variabel-variabel yang digunakan, metode analisa data, serta alat analisa dalam penelitian

### BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang gambaran umum dan perkembangan variabel-variabel penelitian di Kota Padang Panjang.

### BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan temuan empiris dari hasil regresi dan pembahasannya serta menjelaskan implikasi kebijakan.

### BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan pada Bab V, selain itu bab ini juga berisi saran-saran yang nantinya berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.